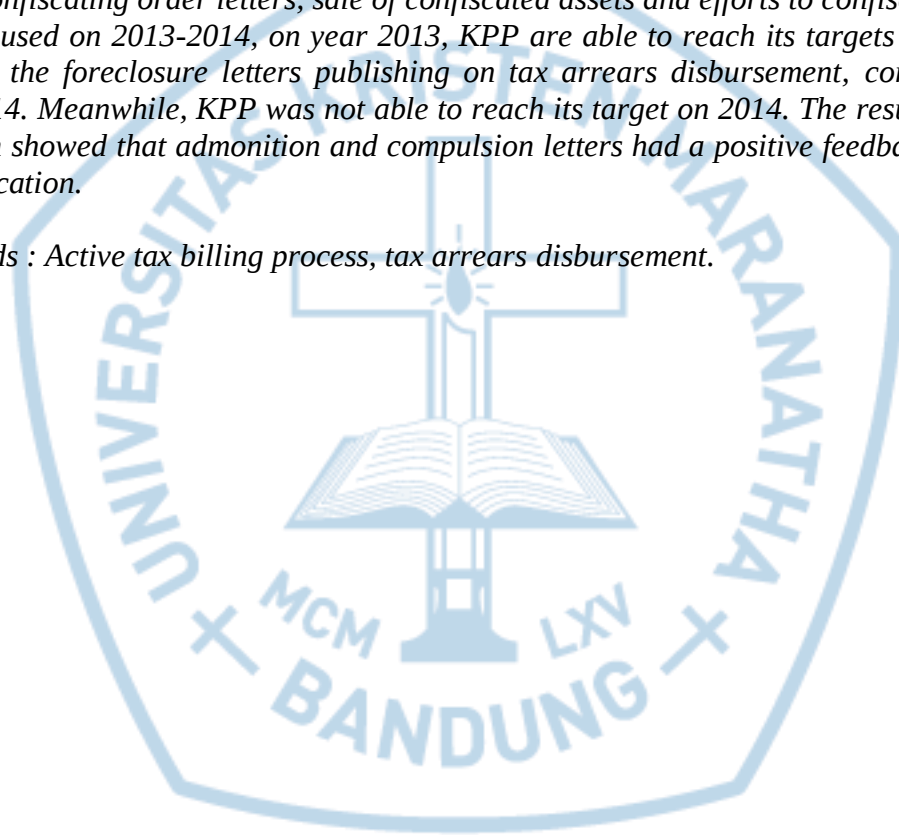


ABSTRACT

The research is aimed to know how active tax billing process was conducted towards tax arrears disbursement on KPP Madya Bandung. Active tax billing process are consisted of admonition letters, compulsion letters, confiscating order letters, foreclosure letters, sale of confiscated assets, and efforts to confiscate; while tax arrears disbursement was based on numbers of targets KPP needed to attain. Field research, in forms of interviews and data gathering related to this research (documentation) were used as the approach method. On this research, tax arrears disbursement were only consisted of admonition letters, compulsion letters, and tab foreclosure letters on year 2013-2014. While confiscating order letters, sale of confiscated assets and efforts to confiscate is not actively used on 2013-2014, on year 2013, KPP are able to reach its targets despite of the lack the foreclosure letters publishing on tax arrears disbursement, compared to year 2014. Meanwhile, KPP was not able to reach its target on 2014. The results of this research showed that admonition and compulsion letters had a positive feedback during its application.

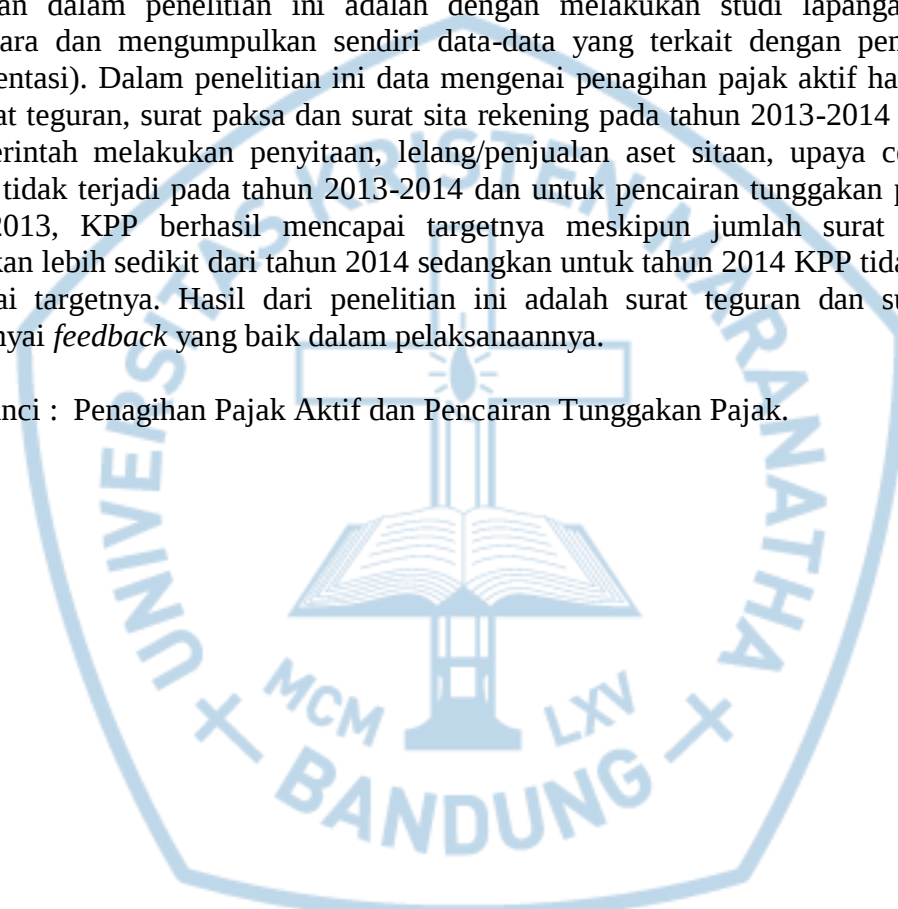
Keywords : Active tax billing process, tax arrears disbursement.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Bandung. Penagihan pajak aktif terdiri atas surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat sita, lelang/penjualan aset sitaan, upaya cegah serta sandera sedangkan pencairan tunggakan pajak didasarkan pada suatu target yang harus dicapai oleh KPP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara dan mengumpulkan sendiri data-data yang terkait dengan penelitian ini (dokumentasi). Dalam penelitian ini data mengenai penagihan pajak aktif hanya terdiri atas surat teguran, surat paksa dan surat sita rekening pada tahun 2013-2014 sedangkan surat perintah melakukan penyitaan, lelang/penjualan aset sitaan, upaya cegah serta sandera tidak terjadi pada tahun 2013-2014 dan untuk pencairan tunggakan pajak pada tahun 2013, KPP berhasil mencapai targetnya meskipun jumlah surat sita yang diterbitkan lebih sedikit dari tahun 2014 sedangkan untuk tahun 2014 KPP tidak berhasil mencapai targetnya. Hasil dari penelitian ini adalah surat teguran dan surat paksa mempunyai *feedback* yang baik dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Penagihan Pajak Aktif dan Pencairan Tunggakan Pajak.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	8
2.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	9
2.5 Cara Pemungutan Pajak	10
2.6 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.7 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.8 Hambatan Pemungutan Pajak	13
2.9 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutnya	14
2.10 Penagihan Secara Umum	15
2.11 Dasar Hukum Penagihan Pajak	15

2.12 Tindakan Penagihan	17
2.13 Penagihan Seketika dan Sekaligus	18
2.14 Penagihan dengan Surat Teguran	19
2.15 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran	21
2.16 Penagihan dengan Surat Paksa.....	22
2.17 Prosedur Penerbitan Surat Paksa	23
2.18 Tata Cara Penyampaian Surat Paksa	25
2.19 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	27
2.20 Penyitaan <i>Monetary Assets</i> Penunggak Pajak.....	27
2.21 Lelang	30
2.22 Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri.....	31
2.23 Penyanderaan.....	31
2.24 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak/Penangguna Pajak.....	32
2.25 Daluwarsa Penagihan Pajak	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Objek Penelitian.....	35
3.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.....	35
3.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.....	39
3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung	42
3.2 Metode Penelitian	43
3.3 Jenis Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Proses Penagihan Pajak Secara Aktif	46
4.1.1 Proses Penagihan Dengan Surat Teguran	46
4.1.2 Proses Penagihan Dengan Surat Paksa	48
4.1.3 Proses Penagihan Dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan..	49

4.1.4 Proses Penagihan Dengan Surat Sita.....	49
4.1.5 Proses Pelelangan/Penjualan Aset Sitaan	50
4.1.6 Proses Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri.....	51
4.1.7 Proses Penyanderaan.....	51
4.2 Pencairan Tunggakan Pajak.....	52
4.3 Analisis Proses Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	55
4.3.1 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran.....	55
4.3.2 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	57
4.3.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan ...	58
4.3.4 Penagihan Pajak Dengan Surat Sita	59
4.3.5 Penagihan Pajak Dengan Proses Pelelangan / Penjualan Aset Sitaan.....	60
4.3.6 Penagihan Pajak Dengan Proses Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri.....	61
4.3.7 Penagihan Pajak Dengan Proses Penyanderaan.....	61
4.3.8 Analisa Proses Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahap Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif	18
Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Madya Bandung	43



DAFTAR TABEL

Tabel I Data Pencairan Tunggakan Pajak	53
Tabel II Data Surat Teguran.....	56
Tabel III Data Surat Paksa	57
Tabel IV Data Surat Sita	59
Tabel V Data Pencairan dengan Penagihan Aktif.....	63

